

BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1. Kemiskinan

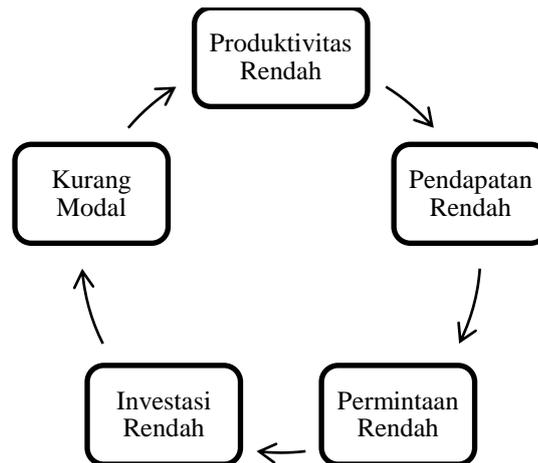
Kemiskinan didefinisikan suatu kondisi kehidupan sangat standar atau suatu kondisi apabila seseorang kesulitan memenuhi kebutuhan pokok seperti sandang, pangan dan papan. Konsep kemiskinan pada umumnya lebih dikenal (*absolutely poor*) dan (*relatively poor*), *absolutely poor* memiliki dua golongan; a. (*Basic needs*) kemiskinan memenuhi kebutuhan pokok atau dasar; b. (*High needs*) kemiskinan memenuhi suatu kebutuhan lebih tinggi. *Relatively poor* ia tidak mempunyai suatu batas terhadap kemiskinan yang jelas, kedua konsep kemiskinan antara *absolute & relative* itu terkait dengan kepemilikan terhadap materi kelayakan hidup. Istilah tersebut mengacu pada (*social distinction*) perbedaan terhadap sosial mengenai distribusi dalam sebuah pendapatan (Saragih, 2015).

Kemiskinan tidak hanya dilihat dari satu sisi tetapi ia bersifat multidimensi seperti; a. Kesehatan (gizi, kematian bayi) b. Pendidikan (lama sekolah, kehadiran dalam pendidikan) c. Standar Hidup Layak (bahan bakar memasak, sanitasi, air bersih, sumber penerangan, kondisi rumah, kepemilikan aset) (BPS DIY, 2017). Kemiskinan menurut Benin, digambarkan sebagai 'fenomena multi-dimensi yang tidak dapat dengan mudah direduksi menjadi beberapa indikator kuantitatif (Longhurst et al, 2017). Menurut Nurkse terjadinya keterbelakangan, tidak sempurnanya pasar dan keterbatasan modal penyebab produktivitas yang tidak maksimal akhirnya berefek pada pendapatan yang rendah. Penerimaan yang

rendah berujung pada rendah tabungan serta investasi dan selanjutnya investasi yang rendah membuat keterbelakangan (Eka et al, 2018).

Gambar 2.1

Lingkaran Setan Kemiskinan Versi Nurkse



Sumber : Eka, Nur, and Hamzah, 2018

Kemiskinan (*poverty*) ia tidak tumbuh tanpa sebab, kemalasan dan kebodohan bukan lah penyebab yang fundamental terhadap tumbuhnya orang-orang miskin. Nasib yang sial juga bukan penyebab mereka miskin tetapi ada gejala penyebab timbulnya kemiskinan, diantaranya (*politic, economy, social*) faktor tersebut yang paling dominan dalam mempengaruhi sebuah kebijakan dan program dipemerintahan. Faktor tersebut sifatnya ada yang berefek atau berdampak besar dan ada yang berdampak kecil tergantung sebuah program tersebut (Dardiri et al, 2014).

Bank Dunia, Pemerintah Indonesia dan Perdagangan Australia telah menemukan setidaknya ada empat faktor penyebab ketimpangan di Indonesia dan mempengaruhi generasi sekarang maupun masa yang akan datang;

1. Ketimpangan Peluang, kebanyakan anak miskin tidak mendapatkan kesempatan awal yang adil didalam hidupnya, sehingga mempengaruhi kehidupan mereka yang akan datang, dan memperkecil peluang sukses dimasa depannya, sepertiga dari ketimpangan tersebut faktor diluar kendali individu.
2. Pekerjaan Yang Tidak Merata, pasar tenaga kerja banyak didominasi berketerampilan tinggi dan upahnya cenderung meningkat, namun bagi pekerja berketerampilan rendah terjebak dalam pekerjaan produktivitas rendah, upah yang rendah dan informal.
3. Tingginya Konsentrasi Kekayaan, hasil dari kekayaan didominasi segelintir orang adalah hasil dari korupsi aset dan menyebabkan terjadinya ketimpangan semakin tinggi baik sekarang maupun yang akan datang.
4. Ketahanan Ekonomi Rendah, gangguan terhadap ekonomi masyarakat miskin menyebabkan ketidakmampuan mereka untuk tetap survive dari masalah ekonomi, serta memperlemah kemampuan mereka mengakses kesehatan, pendidikan dan ekonomi (World Bank, 2015).

Penelitian (Listyaningsih, 2018); “*Perspektif Spasial Penanggulangan Kemiskinan di Yogyakarta*”. Menemukan bahwa tidak ada perbedaan, rata-rata kepala keluarga umurnya 50 tahun tingkat pendidikan rendah SMP dan kepala keluarga rata-rata bekerja di sektor jasa. Menurut topografinya tidak ada potensi perbedaan ekonomi keluarga miskin, rata-rata masyarakat miskin di kawasan dataran investasinya dengan bentuk tabungan, sedangkan masyarakat pedesaan

investasinya dalam bentuk perhiasan. Walaupun antara kedua wilayah tersebut tidak mengindikasikan perbedaan, namun masyarakat pedesaan miskinnya oleh faktor budaya atau kultur dan masyarakat di daerah dataran miskinnya bersifat struktural. Kemiskinan sangat dipengaruhi dari program penanggulangan kemiskinan yang efektif, tepat sasaran mengurangi angka kemiskinan dan manajemen pelaksanaannya harus menjadi perhatian guna untuk pelaksanaan sebuah program menanggulangi kemiskinan yang tepat sasaran.

Penelitian (Hidayati, 2018); “*Potret Kemiskinan dan Upaya Penanggulangannya Melalui Program Perlindungan Sosial di Kawasan Terpencil Banyuwangi Selatan*”. Menemukan bahwa ada sejumlah faktor yang menyebabkan kemiskinan di Erpach dan Sopyono; 1. Kemiskinan *structural* dan *cultural*, 2. Rendahnya motivasi dalam pendidikan efek keterbatasan infrastruktur, 3. SDM yang rendah dalam mengelola sejumlah potensi yang ada didaerah, 4. Tingkat pendidikan rendah, 5. Masyarakat tinggal dikawasan hutan dan pesisir. Langkah telah dilakukan 1. FGD (*Focus Group Discussion*), 2. Menjalankan program SAS (Siswa Asuh Sebaya) bermitra pemerintah desa dengan pemerintah daerah, 3. Pelatihan tentang keterampilan untuk mengelola potensi daerah bermitra Dinas Koperasi dan UMKM kabupaten Banyuwangi, 4. Program wajib belajar bermitra dengan Dinas Pendidikan.

2.2. Penanggulangan Kemiskinan

Dalam penanggulangan kemiskinan perlu modal sosial yang melibatkan pada interaksi sosial disetiap individu, komunitas dan masyarakat, karena hal tersebut sangat penting sebagai pendorong mencapai visi bersama. Penelitian

(Khusna et al, 2019) di Desa Grajangan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi menemukan bahwa modal sosial yang dibangun lewat interaksi (*social, culture and religion*) sangat berperan penting. Modal sosial yang dimaksud yaitu; *trust* (kepercayaan), *belief* (keyakinan), *norms* (norma-norma), *reciprocity* (saling memberi) *rules* (aturan-aturan) dan *networks* (jaringan-jaringan). Jika semua unsur ini telah terpenuhi, maka dalam penanggulangan kemiskinan bisa diminimalisir dengan baik dan mudah dilaksanakan, karena masyarakat perlu ada yang mengayomi.

Penanggulangan kemiskinan membutuhkan suatu analisis yang tepat dan berkelanjutan tidak hanya temporer, karena kemiskinan persoalannya kompleks dan kronis. Penelitian (Nurwana et al., 2017) menggunakan konsep *empowerment* dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Makassar yang sasarannya kelompok Dhuafa (miskin). *Empowerment* salah satu solusi atas realitas ketidakberdayaan masyarakat yang tidak memiliki sumber daya atau kehilangan sebuah kekuatan, dilihat dari tujuan, proses dan cara-caranya, pemberdayaan sebagai berikut; 1. *Empowerment* bertujuan memberi kekuatan kepada orang-orang lemah atau tidak mendapat keberuntungan. 2. *Empowerment* sebagai proses seseorang cukup kuat berpartisipasi berbagai manajemen atas dan mempengaruhi hidupnya. 3. *Empowerment* menyediakan sebuah alokasi usaha kekuasaan lewat perubahan *social structure*. 4. *Empowerment* sebagai cara *people, organization* dan *community* diarah supaya mampu berkuasa atas hidupnya.

Dalam perencanaan sosial dirumuskan sesuai mekanisme atau cocok dengan siklus tertentu, namun ada yang memiliki perbedaan tergantung jenis perencanaan,

tujuan dan konteks, dalam penelitian (Nurwana, 2017), secara garis besar perencanaan sosial ada lima tahapan; 1. *Identification of problems* 2. *Goal setting* 3. *Arrangement and development of program plans* 4. *Implementation of the program* 5. *Program evaluation*.

Dalam penelitian (Larantika, 2017) di Kabupaten Bandung, mengemukakan bahwa kebijakan yang efektif penanggulangan kemiskinan ada lima sebagai berikut; 1. Tepat sasaran atau tidak suatu program dilihat dari indikator yang sesuai atau tidak dengan suatu masalah, rumusan sesuai karakter dan lembaga perumus kebijakan sesuai atau tidak dengan kewenangannya. 2. Pelaksanaan kebijakan tidak hanya satu stakeholder (*government*) tetapi menggandeng berbagai aktor masyarakat dan swasta. 3. Rencana kebijakan yang tidak tumpang tindih (*over lapping*), kebijakan tersebut harus di eksekusi sesuai kondisi, rencana kebijakan baru atau melanjutkan kebijakan lama. 4. Lingkungan ada dua yang harus dilihat dalam membuat kebijakan, a. Internal (komunikasi antar lembaga perumus, pelaksana dan lembaga yang terkait), b. Eksternal (opini publik, interpretasi lembaga strategis di masyarakat dan individu berpengaruh pelaksanaan kebijakan. 5. Secara umum proses pelaksanaan kebijakan dilihat tiga proses, a. Penerimaan kebijakan, b. Adopsi kebijakan, c. Kesiapan strategis. Proses pelaksanaan kebijakan itu bisa dikatakan tepat sasaran ketika ada dukungan politik, strategik dan teknis (Ayu, 2017).

Langkah teknis dalam penanggulangan kemiskinan menurut penelitian (Nasrin et al, 2019), di Desa Lakea II Kabupaten Buol memiliki lima fokus yaitu sebagai berikut; 1. Menjaga kebutuhan pokok tetap stabil, dalam artian

masyarakat miskin tetap terjangkau memenuhi kebutuhan pokoknya seperti beras, dan kebutuhan lainnya. 2. Mendukung pertumbuhan kepada masyarakat yang miskin, yaitu memberi peluang dan fasilitas usaha sebesar-besarnya kepada masyarakat miskin. 3. Memprioritaskan program masyarakat miskin serta memperbanyak program pro rakyat, program ini membantu dalam optimalisasi pemberdayaan dikota dan daerah termarginal. 4. Memberikan pelayanan dasar yang prima pada masyarakat miskin, pelayanan ini berupa pendidikan, kesehatan dan prasarana dasar lainnya. 5. Menyediakan fasilitas serta melengkapi sistem perlindungan sosial masyarakat miskin, kebijakan ini membantu masyarakat yang tidak mampu dalam menghadapi berbagai masalah sosial serta ekonomi.

Dalam penelitian (Rinaldo dan Rahayu, 2018), sinergitas yang baik bisa terjamin apabila tata kelola pemerintahan yang baik dalam hal ini berkolaborasi setiap aktor-aktor yang berkepentingan baik pemerintah maupun masyarakat (*civil society*) dan NGO dalam merumuskan kebijakan, pembuatan kebijakan, pelaksanaan serta evaluasinya. Adapun maksud dan tujuan kolaborasi bukan sekedar untuk kepentingan institusi atau kelompok masing-masing tetapi lebih dari itu, yaitu kepentingan jangka panjang.

Penelitian (Soleh, 2018); “*Analisis dan Strategi Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Jambi*”. Menemukan bahwa terjadi jumlah penduduk yang tidak stabil (fluktuasi) jumlahnya masih di angka 8% dari jumlah keseluruhan penduduk. Strategi yang telah dilakukan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan dengan cara; pengembangan usaha ekonomi baru, institusi/lembaga keuangan mikro dan pendidikan yang berbasis kompetensi.

Penelitian (Fadli dan Nurlukman, 2018); “*Kolaborasi Pemerintah Dalam Pengembangan Terpadu Wilayah Pesisir Di Kabupaten Tangerang Melalui Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai (Gerbang Mapan)*”. Mengungkapkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan aktor ketiga dalam program pengembangan wilayah pesisir masih tergolong minim bahkan di internal pemerintah daerah. Para aktor baik pemerintah daerah, masyarakat dan aktor ketiga lebih fokus pada tugas dan peran masing-masing dari pada berkolaborasi atau bekerja sama antar golongan.

2.3. Tata Kelola Kolaborasi

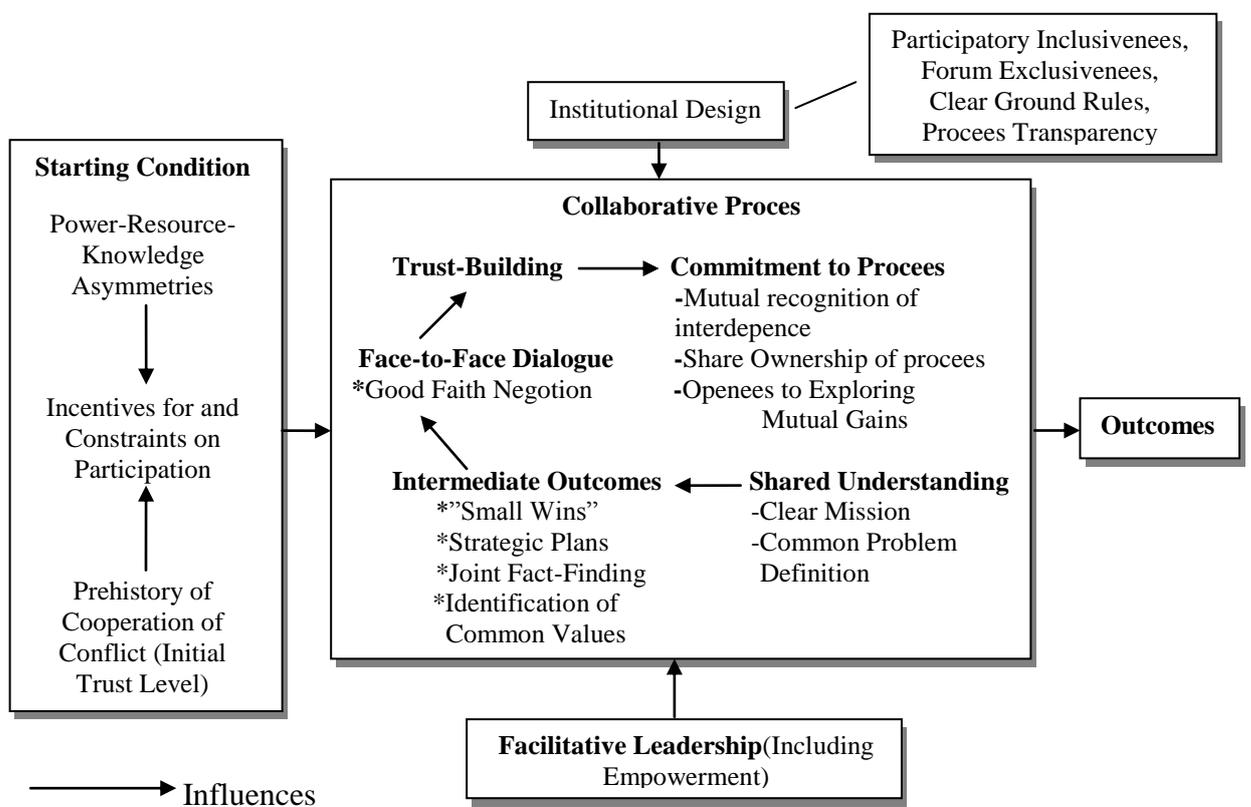
Menurut Booher & Huxham *collaborative governance* didefinisikan suatu bentuk paradigma baru sebuah proses tata kelola semua para pemangku kepentingan terlibat didalamnya (Zaenuri, 2018). Pemangku kepentingan posisinya berbeda satu sama lain namun berkolaborasi dengan bentuk dialog rutin, interaksi demi mencapai tujuan bersama (Ulibarri, 2019). *Collaborative governance* mendorong para pemangku kepentingan mencapai tujuan bersama, berbagi sumberdaya berbeda supaya tercipta pemikiran inovatif dengan negosiasi dan kerjasama (Lee et al. 2019).

Keterbatasan sumberdaya, jaringan dan lain-lain, mengharuskan pemerintah bekerjasama kolaboratif dalam mencapai suatu program (Ali et al, 2018). Menurut Ansell & Gash tata kelola kolaborasi adalah suatu pengaturan dilakukan satu atau lebih badan lembaga publik, baik Pemerintah berkolaborasi dengan stakeholders atau badan non negara yang berkepentingan suatu keputusan kolektif dan formal (Muhammad et al, 2017). Orientasi tersebut mengarah pada konsensus

dan sifatnya deliberatif terhadap tujuan implementasi kebijakan publik atau penggunaan dengan aset publik (Ran and Qi 2018).

Menurut Ansell & Gash, *collaborative governance* ada *face to face dialogue*, *Trust building*, *commitment to process*, *shared understanding* dan *intermediate outcomes* (Novita, 2018). Dalam tata kelola kolaborasi: a. Musyawarah di awali lembaga publik; b. Kelompok masyarakat dan NGO berpartisipasi, c. Agenda setting semua aktor, d. Sifat forumnya formal, e. Keputusan melalui konsensus, f. Fokus public policy dan public management (Arifin dan Dewi, 2017).

Gambar 2.2
Collaborative Governance



Sumber : Ansell & Gash, 2018

Penelitian (Sofi dan Mutiarin, 2018); “*Collaborative Governance In The Management Of Village Owned Enterprises Ponggok Sub District Polanharjo District Klaten Central Java 2016*”. Mengungkapkan bahwa Desa Ponggok memiliki perusahaan yang melibatkan 3 aktor Pemerintah Desa, Masyarakat dan sektor Swasta. Tata kelola kolaboratif sangat berperan dalam mendorong akuntabilitas dan transparansi pengelolaan perusahaan milik Desa. Keberhasilan Desa Ponggok mendirikan dan menjalankan perusahaan milik Desa Tirta Mandiri menjadikan Desa Ponggok sebagai salah satu Desa terkaya di Indonesia dengan pendapatan 9,6 miliar rupiah per tahun, dan hasil dari tata kelola kolaboratif sampai saat sekarang dapat dirasakan oleh penduduk Desa dalam bentuk kesejahteraan.

Penelitian (Zaenuri, 2018); “*Tata Kelola Pariwisata Bencana Dalam Perspektif Collaborative Governance (Studi Kasus Bencana Volcano Tour Merapi Di Kabupaten Sleman)*”. Menemukan ada beberapa problem dalam tata kelola bencana dengan pendekatan *collaborative governance*. Kebutuhan kolaborasi pemerintah, swasta dan masyarakat masih bersifat adaptif yaitu hanya kebutuhan sesaat, masing-masing *stakeholders* belum terbangun kerjasama proporsional, pemerintah masih mendominasi. Pemerintah, swasta dan masyarakat masih kategori sedang intensitas hubungannya, sementara swasta dan masyarakat masuk kategori tinggi dan secara umum masyarakat masih mendominasi dalam menyediakan pelayanan pariwisata. *Collaborative governance* pariwisata bencana terjadi perubahan signifikan, dari yang informal menjadi formal, dari komando menuju kolaborasi dan dari *share vision* menuju kemitraan.

Penelitian (Giat dan Ulung, 2016); “*Pelaksanaan Collaborative Governance di Desa Budaya Brosot, Galur, Kulonprogo, DI. Yogyakarta*”. Menemukan bahwa pelaksanaan model *collaborative governance* secara umum sama dengan model yang dimaksud Ansell & Gash. Pelaksanaan *collaborative governance* di Desa Budaya Brosot ada beberapa faktor yang telah mempengaruhi : ada hubungan kekerabatan, arisan, musyawarah mufakat, jam karet, paternalistik, apatis, tidak ada pergantian kepengurusan, gotong royong dan swadaya. Penelitian (Sahar dan Salomo, 2018); “*Tata Kelola Kolaboratif Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Pinrang*”. Mengungkapkan bahwa terjadinya pembangunan yang tidak optimal bahkan pada dimensi trust *mutual understanding* yang menjadi dasar semua komponennya, kapasitas para pemimpin berkolaborasi adalah variabel sebagai penentu penghambat untuk sebuah kebijakan dalam (*collaborative dynamics*) atau yang lebih ke interaktif dan dinamis.

Penelitian (Diyanayati et al, 2018); “*Sinergi Pemerintah Dan Perguruan Tinggi Menuju Desa Maju Dan Bermartabat Melalui Implementasi Program Desa Sejahtera Mandiri*”. Menemukan bahwa terjadi *miss understanding* antar masyarakat dengan para *stakeholders* terkait pelaksanaan dalam program DSM (Desa Sejahtera Mandiri). Lima lokasi penelitian mengungkapkan bahwa yang tertinggi atau mayoritas jumlah responden yang tidak memahami program tersebut adalah 55,33 % kurang memahami, 32,67 % cukup memahami, dan 12 % yang memahami. Responden yang memahami program Desa Sejahtera Mandiri tersebut berasal dari kalangan perguruan tinggi dan dinas sosial setempat yang menjalin kerja sama, sedangkan 55,33 % kurang memahami, ini berasal dari

kalangan mahasiswa KKN, aparat SKPD diluar dinas sosial serta para aparat Desa. Tingginya jumlah angka yang tidak memahami program tersebut bukan disebabkan kurangnya partisipasi masyarakat, tetapi kurangnya sosialisasi pelaksanaan program DSM tersebut ke masyarakat (Tokoh Masyarakat, Karang Taruna, TKSK, pendamping PKH), padahal masyarakatnya sendiri bersedia untuk ikut dalam program tersebut.

Penelitian (Makasenda et al, 2019); *“Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Manado (Suatu Studi di Kecamatan Tuminting)”*. Menemukan bahwa masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaan program keluarga harapan di Kecamatan Tuminting Kota Manado. Pelaksanaan yang tidak tepat, misalnya para penerima justru kalangan ekonomi menengah ke atas masih kental aroma politisnya, pemerintah dituntut komitmen, konsisten dalam menangani problem kemiskinan.

Penelitian (Khusna et al, 2019); *“Spiritualitas Agama dan Etos Kerja Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan Nelayan Desa Grajangan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi”*. Menemukan bahwa para nelayan mempunyai spirit etos kerja yang tinggi namun semangat tersebut tidak dibarengi dengan etika kerja yang sesuai dipahami dalam ajaran agama. Strategi yang digunakan dalam upaya penanggulangan kemiskinan bagi para nelayan adalah modal sosial yang telah tertanam baik berbentuk individu ataupun kolektif.

Penelitian (Mustaqimah et al, 2017); *“Peran Belanja Modal Pemerintah dan Investasi Pembangunan Manusia dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Indonesia”*. Menemukan bahwa modal yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk

pembangunan manusia sangat signifikan berefek terhadap mengurangi angka kemiskinan di Indonesia dan berdampak lebih besar terhadap mengurangi angka kemiskinan yaitu pemberian untuk sektor pendidikan. Penelitian (Murohman et al, 2016); *“Pengembangan Sektor Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan di Kalimantan Barat”*. Mengungkapkan bahwa menggunakan metode dekomposisi sangat membantu dalam pertumbuhan dan menurunkan angka kemiskinan rumah tangga miskin. Kebijakan yang sangat signifikan dalam mendorong angka kemakmuran masyarakat dengan jalur industrialisasi pertanian serta modal manusia untuk kaum miskin dan juga harus ditingkatkan pendidikan, pelatihan untuk meminimalisir supaya kemampuan para petani lebih baik lagi dan meningkatkan daya produktivitas.

Penelitian (Mahsyar, 2015); *“Public Private Partnership : Kolaborasi Pemerintah dan Swasta Dalam Pengelolaan Asset Publik di Kota Makassar”*. Menemukan bahwa Pemerintah Kota Makassar memberikan kepada pihak swasta untuk mengelola aset publik, karena keterbatasan sumber daya manajemen dana konstruksi, pemeliharaan, fasilitas dan personil. Kolaborasi dengan swasta banyak memberi keuntungan pemerintah, proses pengembangan aset publik bisa secara cepat dan penggunaan anggaran daerah bisa diminimalisir. Berdampak positif terhadap PAD pemerintah daerah dan tidak terbebani dalam pengelolaan dan pemeliharaan lahan, area ruang publik nyaman dan hijau dipusat kota. Swasta mendapat manfaat berupa penggunaan lahan dan tanah sekitar sebagai tempat bisnis dan publik mendapat manfaat sarana dan prasarana rekreasi, olahraga dan lainnya. Penelitian (Firdaus, 2014); *“Pengentasan Kemiskinan Melalui*

Pendekatan Kewirausahaan Sosial". Mengungkapkan bahwa kehadiran wirausahaan sosial sangat membantu dalam penyelesaian *problem social*, serta instrumen yang penting untuk wirausahaan adalah penciptaan nilai sosial dan inovasi. Membaiknya perekonomian masyarakat berkat dari peran Mitra Bali dan Bina Swadaya dalam menurunkan angka kemiskinan, kemudian menjadi penting wirausahaan sosial terhadap keberdayaan masyarakat.

Tabel 2.1
Kajian Pustaka

No	Nama Penulis & Judul	Temuan Penelitian	Kekuatan/Keterbatasan
1	(Sofi dan Mutiarin, 2018) " <i>Collaborative Governance In The Management Of Village Owned Enterprises Pongkok Sub District Polanharjo District Klaten Central Java 2016</i> ".	Penelitian ini mengungkapkan bahwa Desa Pongkok memiliki perusahaan yang melibatkan 3 aktor yaitu Pemerintah Desa, masyarakat dan sektor Swasta. Tata kelola kolaboratif sangat berperan dalam mendorong akuntabilitas dan transparansi untuk pengelolaan perusahaan milik Desa oleh para aktor kolaborasi tersebut. Bahkan keberhasilan Desa Pongkok untuk mendirikan dan menjalankan perusahaan milik Desa Tirta Mandiri menjadikan Desa Pongkok sebagai salah satu Desa yang terkaya di Indonesia dengan pendapatan 9,6 miliar rupiah per tahun, dan kemudian hasil dari tata kelola kolaboratif tersebut sampai saat sekarang dapat dirasakan oleh penduduk Desa dalam bentuk kesejahteraan.	Keunggulan penelitian ini mendeskripsikan bahwa telah terbukti <i>collaborative governance</i> yang dilakukan oleh tiga <i>stakeholders</i> (pemerintah desa, masyarakat dan swasta) berjalan dengan baik, dengan terlihat jelas angka pendapatan yang dihasilkan dari kebijakan <i>collaborative governance</i> tersebut.
2	(Sahar dan Salomo, 2018) " <i>Tata Kelola Kolaboratif Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Pinrang</i> ".	Penelitian ini mengungkapkan bahwa terjadinya sebuah pembangunan yang tidak optimal bahkan pada dimensi trust juga mutual understanding yang menjadi dasar semua komponennya, kapasitas para pemimpin berkolaborasi adalah variabel sebagai penentu penghambat untuk sebuah kebijakan dalam (<i>collaborative dynamics</i>) atau yang lebih ke interaktif dan dinamis.	Kekuatan penelitian ini dijelaskan faktor apa saja yang menghambat proses <i>collaborative governance</i> dan merekomendasikan tidak semua daerah itu bisa diterapkan konsep yang sama terkait <i>collaborative governance</i> . Kelemahannya belum ada rekomendasi yang tepat terkait bagaimana pelaksanaan <i>collaborative</i>

			<i>governance</i>
3	(Diyanyati et al,2018) “ <i>Sinergi Pemerintah Dan Perguruan Tinggi Menuju Desa Maju Dan Bermartabat Melalui Implementasi Program Desa Sejahtera Mandiri</i> ”.	Penelitian ini menemukan bahwa terjadi miss understanding antar masyarakat dan para stakeholders terkait pelaksanaan program DSM (Desa Sejahtera Mandiri). Lima lokasi mengungkapkan yang tertinggi jumlah responden tidak memahami program tersebut 55,33 % kurang memahami, 32,67 % cukup memahami, dan 12 % yang memahami. Responden yang memahami program Desa Sejahtera Mandiri tersebut berasal dari kalangan perguruan tinggi dan dinas sosial setempat yang menjalin kerja sama, sedangkan 55,33 % kurang memahami, berasal dari kalangan mahasiswa KKN, aparat SKPD yang diluar dinas sosial serta para aparat Desa. Tingginya jumlah angka yang tidak memahami program tersebut bukan disebabkan kurangnya partisipasi masyarakat, tetapi kurangnya sosialisasi pelaksanaan program DSM tersebut ke masyarakat (Tokoh Masyarakat, Karang Taruna, TKSK, pendamping PKH), padahal masyarakatnya sendiri bersedia untuk ikut dalam program tersebut.	Keunggulan penelitian ini menyediakan data secara komprehensif apa saja faktor-faktor serta dari mana saja yang menghambat pelaksanaan program tersebut. Kelemahannya tidak secara jelas digambarkan siapa yang berperan primer dalam kebijakan tersebut dan siapa yang posisinya yang sekunder dalam kebijakan tersebut, sehingga memberi celah kemungkinan salah satu stakeholder kurang ikut berpartisipasi karena posisinya belum jelas.
4	(Fadli dan Nurlukman, 2018) “ <i>Kolaborasi Pemerintah Dalam Pengembangan Wilayah Terpadu Wilayah Pesisir Di Kabupaten Tangerang Melalui Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai (Gerbang Mapan)</i> ”.	Penelitian ini mengungkapkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, serta aktor ketiga dalam program pengembangan wilayah pesisir masih tergolong minim bahkan di internal pemerintah daerah. Para aktor baik pemerintah daerah, masyarakat dan aktor ke tiga lebih fokus pada tugas dan peran masing-masing dari pada berkolaborasi atau bekerja sama antar golongan.	Kelebihan penelitian ini menggunakan model kolaborasi dalam upaya pengentasan kemiskinan dan menjelaskan setiap para aktor <i>stakeholders</i> (pemerintah, masyarakat dan swasta) tidak adanya kesamaan visi dalam menjalankan program. Kelemahannya tidak secara jelas dalam metode apa atau pemetaan yang digunakan <i>collaborative governance</i> .
5	(Hidayati,2018) “ <i>Potret Kemiskinan dan Upaya Penanggulangannya Melalui Program Perlindungan Sosial di</i>	Penelitian ini menemukan bahwa ada sejumlah faktor yang menyebabkan kemiskinan di Erpach dan Sopyonyo, yaitu 1. Kemiskinan <i>structural</i> dan <i>cultural</i> , 2. Rendahnya motivasi dalam pendidikan efek keterbatasan	Keunggulan penelitian ini menjelaskan apa saja indikator-indikator yang menyebabkan masyarakat di daerah Banyuwangi Selatan tetap berada digaris

	<i>Kawasan Terpencil Banyuwangi Selatan</i> ”.	infrastruktur (tempat pendidikan terpisah jauh dari tempat tinggal), 3. SDM (keterampilan) yang rendah dalam mengelola sejumlah potensi yang ada di daerah, 4. Tingkat pendidikan yang rendah, 5. Masyarakat tinggal di kawasan hutan dan pesisir. Langkah-langkah yang telah dilakukan 1. FGD (<i>Focus Group Discussion</i>), 2. Menjalankan program SAS (Siswa Asuh Sebaya) bermitra pemerintah desa dengan pemerintah daerah, 3. Pelatihan tentang keterampilan untuk mengelola potensi daerah bermitra Dinas Koperasi dan UMKM kabupaten Banyuwangi, 4. Program wajib belajar bermitra dengan Dinas Pendidikan.	kemiskinan. Kelemahannya tidak begitu banyak dijelaskan yang bagian mitra (MOU) antara pemerintah Desa dengan pemerintah Daerah.
6	(Soleh, 2018) “ <i>Analisis dan Strategi Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Jambi</i> ”.	Penelitian ini menemukan bahwa terjadi jumlah penduduk yang tidak stabil (fluktuasi) yang jumlahnya masih di angka 8% dari jumlah keseluruhan penduduk. Strategi yang telah dilakukan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan yaitu dengan cara; pengembangan usaha ekonomi baru, institusi/lembaga keuangan mikro dan pendidikan yang berbasis kompetensi.	Kekuatan penelitian ini menggunakan strategi yang apalikatif berupa usaha baru bagi masyarakat miskin, penyediaan sebuah kelembagaan mikro dan perbaikan terhadap kualitas pendidikan. Kelemahan konsep manajemen strategisnya hanya fokus pada jangka panjang, namun tidak ada solusi dalam jangka pendek yang membutuhkan penanganan secara cepat.
7	(Listyaningsih,2018) “ <i>Perspektif Spasial Penanggulangan Kemiskinan di Yogyakarta</i> ”.	Penelitian ini menemukan bahwa tidak ada sebuah perbedaan, rata-rata kepala keluarga yang umurnya 50 tahun yang tingkat pendidikan rendah SMP dan kepala keluarga rata-rata bekerja di sektor jasa. Menurut topografinya tidak ada potensi perbedaan ekonomi keluarga miskin, rata-rata masyarakat miskin di kawasan dataran investasinya dengan bentuk tabungan, sedangkan masyarakat pedesaan investasinya dalam bentuk perhiasan. Walaupun antara kedua wilayah tersebut tidak mengindikasikan perbedaan, namun masyarakat pedesaan miskinnya oleh faktor budaya atau kultur dan masyarakat di daerah dataran miskinnya bersifat	Keunggulan penelitian ini menjelaskan bahwa tidak ada pengaruhnya tingkat kemiskinan terhadap pendidikan seseorang. Kelemahan dari penelitian ini tidak secara komprehensif hanya menganalisis tingkat kemiskinan dan program penanggulangan kemiskinan.

		<p>struktural. Kemiskinan sangat dipengaruhi dari program penanggulangan kemiskinan yang efektif dan juga tepat sasaran untuk mengurangi angka kemiskinan dan manajemen pelaksanaannya harus menjadi perhatian guna untuk pelaksanaan sebuah program menanggulangi kemiskinan yang tepat sasaran.</p>	
8	<p>(Zaenuri, 2018) “<i>Tata Kelola Pariwisata Bencana Dalam Perspektif Collaborative Governance (Studi Kasus Bencana Volcano Tour Merapi Di Kabupaten Sleman)</i>”.</p>	<p>Penelitian ini menemukan ada beberapa problem dalam tata kelola bencana dengan pendekatan <i>collaborative governance</i>. Kebutuhan kolaborasi pemerintah, swasta dan masyarakat masih bersifat adaptif yaitu hanya kebutuhan sesaat, masing-masing stakeholder belum terbangun kerjasama proporsional, pemerintah masih mendominasi. Pemerintah, swasta dan masyarakat masih kategori sedang intensitas hubungannya, sementara swasta dan masyarakat masuk kategori tinggi dan secara umum masyarakat masih mendominasi dalam menyediakan pelayanan pariwisata. <i>Collaborative governance</i> pariwisata bencana terjadi perubahan signifikan, dari yang informal menjadi formal, dari komando menuju kolaborasi dan dari <i>share vision</i> menuju kemitraan.</p>	<p>Keunggulan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan <i>collaborative governance</i> dalam menangani masalah kebencanaan yang ada di Kabupaten Sleman Yogyakarta, serta tidak hanya menjelaskan masalah <i>collaborative governance</i> namun juga menjelaskan bagaimana cara menanggapi masalah kebencanaan dari sebelum terjadi bencana, serta sesudah bencana dan juga bagaimana pasca bencana itu bisa dipulihkan ekonomi masyarakat sekitar yang terkena dampak bencana lewat pembangunan wisata bencana.</p>
9	<p>(Makasenda et al, 2019) “<i>Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Manado (Suatu Studi di Kecamatan Tuminting)</i>”.</p>	<p>Penelitian ini menemukan bahwa masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaan program keluarga harapan di Kecamatan Tuminting Kota Manado. Pelaksanaan yang tidak tepat, misalnya para penerima justru kalangan ekonomi menengah ke atas masih kental aroma politisnya, pemerintah dituntut komitmen, konsisten dalam menangani problem kemiskinan.</p>	<p>Kelebihan penelitian ini adalah bahwa salah satu faktor sulitnya terlaksana program tersebut akibat dari banyaknya intervensi berbagai kepentingan dari pemangku kebijakan. Kelemahan penelitian ini hanya menjelaskan dari sisi politis para pemangku kebijakan, namun tidak menjelaskan dari faktor-faktor apa saja gagalnya pelaksanaan program tersebut secara rinci atau jelas.</p>
10	<p>(Khusna et al, 2019) “<i>Spiritualitas Agama</i>”</p>	<p>Penelitian ini menemukan bahwa para nelayan mempunyai spirit etos kerja</p>	<p>Kelebihan penelitian ini bahwa menggunakan</p>

	<p>dan Etos Kerja Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan Nelayan Desa Grajangan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi”.</p>	<p>yang tinggi namun semangat tersebut tidak dibarengi dengan etika kerja yang sesuai dipahami dalam ajaran agama. Strategi yang digunakan dalam upaya penanggulangan kemiskinan bagi para nelayan adalah modal sosial yang telah tertanam baik berbentuk individu ataupun kolektif.</p>	<p>pendekatan relegius atau pendekatan keagamaan dalam mengatasi kemiskinan yang terjadi di Desa Grajangan Kabupaten Banyuwangi. Kelemahannya tidak menggunakan pendekatan ekonomi secara praktis dalam penanggulangan kemiskinan.</p>
11	<p>(Mustaqimah et al,2017) “Peran Belanja Modal Pemerintah dan Investasi Pembangunan Manusia dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Indonesia”.</p>	<p>Penelitian ini menemukan bahwa modal yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pembangunan manusia sangat signifikan berefek terhadap mengurangi angka kemiskinan di Indonesia dan juga dampak yang lebih besar terhadap mengurangi angka kemiskinan yaitu pemberian untuk sektor pendidikan.</p>	<p>Kelebihan dari penelitian ini menjelaskan bahwa peran belanja modal dari pemerintah sangat membantu dalam menangani kemiskinan di Indonesia. Kelemahannya tidak ada semacam solusi alternatif dalam mengurangi angka kemiskinan, hanya satu sasaran yaitu pendidikan.</p>
12	<p>(Giat dan Ulung, 2016) “Pelaksanaan Collaborative Governance di Desa Budaya Brosot, Galur, Kulonprogo, DI. Yogyakarta”.</p>	<p>Penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan model <i>collaborative governance</i> secara umum sama dengan model yang dimaksud oleh Ansell & Gash. Pelaksanaan <i>collaborative governance</i> di Desa Budaya Brosot ada beberapa faktor yang telah mempengaruhi : ada hubungan kekerabatan, arisan, musyawarah mufakat, jam karet, paternalistik, apatis, tidak ada pergantian kepemimpinan, gotong royong dan swadaya.</p>	<p>Keunggulan dari penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan model <i>collaborative governance</i> di Desa. Kelemahannya dari penelitian ini hanya menjelaskan dari sisi politis yang menghambat terlaksananya <i>collaborative governance</i></p>
13	<p>(Murohman et al,2016) “Pengembangan Sektor Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan di Kalimantan Barat”.</p>	<p>Penelitian ini mengungkapkan bahwa menggunakan metode dekomposisi sangat membantu dalam pertumbuhan dan menurunkan angka kemiskinan rumah tangga miskin. Kebijakan yang sangat signifikan dalam mendorong angka kemakmuran masyarakat dengan jalur industrialisasi pertanian serta modal manusia untuk kaum miskin dan juga harus ditingkatkan pendidikan, pelatihan untuk meminimalisir supaya kemampuan para petani lebih baik lagi dan meningkatkan daya produktivitas.</p>	<p>Keunggulan dari penelitian ini menjelaskan bahwa pendekatan dekomposisi sangat berefek terhadap peningkatan ekonomi masyarakat dan langkah praktisnya juga dengan industrialisasi pertanian serta peningkatan pendidikan masyarakat.</p>

14	(Mahsyar, 2015) “ <i>Public Private Partnership Kolaborasi Pemerintah dan Swasta Dalam Pengelolaan Asset Publik di Kota Makassar</i> ”.	Penelitian ini menemukan, pemerintah Kota Makassar memberikan kepada pihak swasta untuk mengelola aset publik, karena keterbatasan sumber daya manajemen dana konstruksi, pemeliharaan, fasilitas dan personil. Kolaborasi dengan pihak sektor swasta banyak memberi keuntungan bagi pemerintah, proses pengembangan aset publik bisa secara cepat dan penggunaan anggaran daerah bisa diminimalisir. Berdampak positif terhadap PAD pemerintah daerah dan tidak terbebani lagi dalam pengelolaan dan pemeliharaan lahan, area ruang publik nyaman dan hijau dipusat kota. Swasta mendapat manfaat berupa penggunaan lahan dan tanah sekitar sebagai tempat bisnis dan publik mendapat manfaat sarana dan prasarana rekreasi, olahraga dan lainnya.	Keunggulan penelitian ini menggunakan pendekatan kolaborasi dengan pihak swasta dalam pengelolaan masalah aset publik. Kelemahannya dari penelitian ini tidak banyak dijelaskan fungsi atau keberadaan masyarakat kecuali hanya sebagai pihak konsumers.
15	(Firdaus, 2014) “ <i>Pengentasan Kemiskinan Melalui Pendekatan Kewirausahaan Sosial</i> ”.	Penelitian ini mengungkapkan bahwa kehadiran wirausahaan sosial sangat membantu dalam penyelesaian <i>problem social</i> , serta instrumen yang penting untuk wirausahaan adalah penciptaan nilai sosial dan inovasi. Membaiknya perekonomian masyarakat berkat dari peran Mitra Bali dan Bina Swadaya dalam menurunkan angka kemiskinan, kemudian menjadi penting wirausahaan sosial terhadap keberdayaan masyarakat.	Kelebihan dari penelitian ini banyak menjelaskan bahwa <i>problem social</i> yang ada di Bali banyak terbantu oleh pihak swasta. Kelemahan dari penelitian ini hanya menjelaskan posisi swasta dalam menangani kemiskinan, namun tidak banyak dijelaskan peran masyarakat sebagai objek atau sasaran dari kebijakan tersebut.

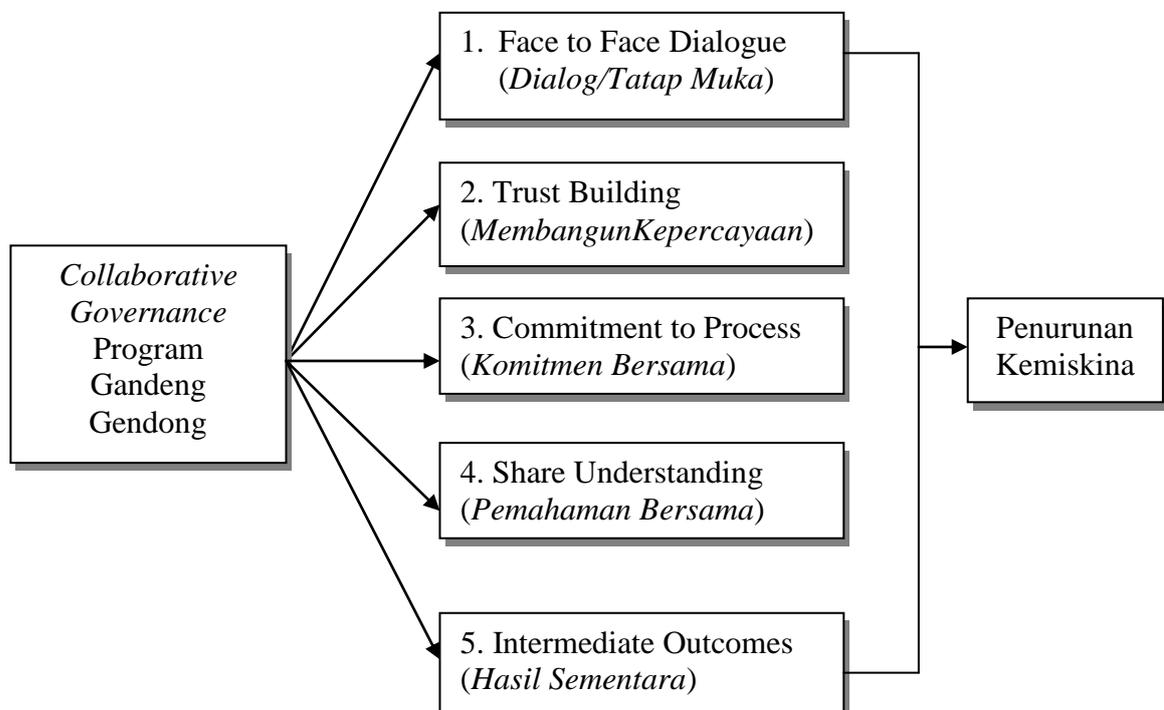
Sumber : Data diolah oleh Peneliti dari berbagai sumber, 2019

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti sendiri berbeda dari kasus-kasus yang telah diteliti oleh para peneliti seperti yang telah dijelaskan dikajian pustaka sebelumnya. Kasus yang menjadi titik fokus oleh peneliti sendiri adalah bagaimana pemerintah kota Yogyakarta dalam menurunkan angka kemiskinan di kota Yogyakarta lewat program gendeng-gendong. Kelompok yang terlibat dalam proyek tersebut meliputi lima element atau lebih dikenal oleh pemerintah Kota

Yogyakarta 5K yaitu Pemerintah Kota, Korporasi, Kampus, Kampung dan Komunitas. Peneliti juga ingin melihat apakah dengan berkolaborasi lima element atau 5K tersebut mampu menurunkan secara signifikan angka kemiskinan di Kota Yogyakarta.

2.4. Kerangka Pikir

Gambar 2.3
Kerangka Pikir Penelitian



2.5. Definisi Konseptual

1. Kemiskinan suatu kondisi kehidupan sangat standar dan suatu kondisi apabila seseorang kesulitan memenuhi kebutuhan pokok sandang, pangan dan papan.
2. Penanggulangan Kemiskinan adalah menggunakan modal sosial yang melibatkan pada interaksi sosial disetiap individu, komunitas dan masyarakat, modal sosial tersebut (*trust, belief, norms, reciprocity, rules and networks*).

3. Tata Kelola Kolaborasi suatu pengaturan dilakukan oleh satu atau lebih badan lembaga publik, baik oleh Pemerintah berkolaborasi dengan para *stakeholder* atau badan non negara yang berkepentingan dalam suatu keputusan kolektif dan formal.

2.6. Definisi Operasional

Untuk mengetahui indikator Tata Kelola Kolaborasi Dalam Penanganan Kemiskinan di Kota Yogyakarta program Gandeng Gendong sebagai berikut :

1. Face to Face Dialogue (*Dialog/Tatap Muka*)
2. Trust Building (*Membangun Kepercayaan*)
3. Commitment to Process (*Komitmen Bersama*)
4. Share Understanding (*Pemahaman Bersama*)
5. Intermediate Outcomes (*Hasil Sementara*)